

RINGKASAN

Pengelolaan sumber daya alam perairan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS Cibereum di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan frekuensi banjir akibat kerusakan hulu, alih fungsi lahan, sedimentasi, dan lemahnya pengendalian tata ruang, yang menunjukkan belum optimalnya tata kelola perairan. Dalam konteks kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DPD RI dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam perairan dalam penanganan banjir Sungai Cibereum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi dari unsur legislatif, instansi teknis, dan masyarakat terdampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam penanganan banjir Sungai Cibereum di Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan kerangka teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle, ditemukan adanya kesenjangan antara ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan lembaga teknis dengan pelaksanaan pengawasan yang masih bersifat insidental, kurang terstruktur, serta belum didukung oleh mekanisme tindak lanjut yang memadai. Dari sisi evaluasi, meskipun kehadiran DPD RI di lapangan memperoleh respons positif dari masyarakat, efektivitas fungsi pengawasan secara kelembagaan masih dinilai belum maksimal, terutama dalam aspek koordinasi, keberlanjutan, dan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI masih memerlukan penguatan agar mampu berperan secara lebih efektif dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kata Kunci : Banjir, DPD RI, Sumber Daya Alam Perairan

SUMMARY

Water resource management plays a crucial role in maintaining ecosystem balance, particularly within river basin areas. The Cibereum Watershed in Cilacap Regency has experienced an increasing frequency of flooding due to upstream degradation, land-use conversion, sedimentation, and weak spatial planning control, indicating suboptimal water governance. Institutionally, the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) holds constitutional authority to carry out oversight functions in natural resource management. This study aims to describe and analyze the role of DPD RI in strengthening water resource management policies in addressing the Cibereum River flooding.

This research employs a descriptive qualitative method using purposive sampling to select informants. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis follows the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation involving legislative actors, technical agencies, and affected communities.

The findings reveal that the oversight function of DPD RI in handling the Cibereum River flooding in Cilacap Regency has not been fully optimal. Based on Bruce J. Biddle's role theory, there is a gap between high expectations from the community and technical institutions and the actual implementation of oversight, which remains incidental, less structured, and lacks adequate follow-up mechanisms. From an evaluative perspective, although the presence of DPD RI in the field is positively perceived by the community, the institutional effectiveness of its oversight function is still considered insufficient, particularly in terms of coordination, continuity, and influence on policy implementation. This condition indicates the need to strengthen the oversight function of DPD RI to better address public needs and problems.

Keywords : DPD RI, Flood, Water Resources